

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam era modern yang didominasi oleh isu-isu etika dan tuntutan tanggung jawab sosial, penting bagi organisasi dan individu untuk membuat keputusan yang etis. Keputusan etis memiliki peran penting dalam membangun kepercayaan masyarakat, menjaga reputasi organisasi, serta mencapai tujuan secara berkelanjutan. Oleh karena itu, riset mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi penilaian etis individu sangat relevan dan esensial.

Dalam sektor publik terdapat beberapa lembaga salah satunya adalah lembaga pemerintahan. Pemerintahan merupakan sebuah organisasi atau lembaga yang memiliki kekuasaan untuk mengatur wilayahnya. Pemerintahan merupakan pemegang tanggung jawab atas pengelolaan suatu wilayah dan membuat keputusan strategis. Sangat penting bagi suatu lembaga pemerintahan untuk menjaga integritas dan mencegah adanya tindakan yang merugikan wilayahnya, seperti perilaku tidak etis. Ada banyak masalah mengenai perilaku tidak etis terhadap sektor publik maupun sektor swasta diantaranya adalah korupsi, penyalahgunaan aset, penyalahgunaan kekuasaan dan penyalahgunaan tugas (Johari et al., 2020).

Penting untuk menerapkan perilaku etis, terutama dalam konteks etika profesi yang mencakup aspek sosial. Etika profesi bersifat khusus dan berlaku

di dalam kelompok profesi tertentu, seperti yang terjadi dalam penelitian ini yang berkaitan dengan profesi akuntan. Saat ini, masih terdapat banyak pelanggaran etika yang dilakukan oleh akuntan, yang disebabkan oleh praktik-praktik profesi yang mengabaikan standar akuntansi dan prinsip etika. Krisis etika dalam profesi akuntan menjadi sorotan, terutama setelah beberapa perusahaan besar terlibat dalam skandal akuntansi (Primasari, 2014)

Skandal akuntansi muncul akibat penyalahgunaan keahlian dalam mengolah informasi akuntansi dengan cara yang dimanipulasi, sehingga menghasilkan informasi yang tidak mencerminkan fakta, semata-mata hanya untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Skandal ini berdampak negatif terhadap perekonomian masyarakat dan negara. Cenderungnya manusia untuk mengejar akumulasi kekayaan dan keuntungan materiil sering kali menyebabkan lupa akan prinsip dan moral.

Isu pelanggaran etika di Indonesia terus berkembang seiring dengan beberapa kasus yang terjadi. Salah satu contoh adalah insiden pelanggaran etika yang melibatkan kasus yang terjadi melibatkan PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk. Perusahaan ini mengalami sengketa pajak dengan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang terdiri dari 4 pokok sengketa. Sengketa ini membuat publik berasumsi bahwa PGAS telah melakukan fraud pada laporan keuangannya. Sengketa ini terjadi karena DJP menganggap penyerahan gas bumi yang dilakukan oleh PGAS merupakan objek pajak, sedangkan

perusahaan menganggap transaksi tersebut sudah diakui sebagai objek yang tidak kena pajak oleh Kementerian Keuangan. Sengketa ini adalah perbedaan interpretasi perusahaan dan otoritas pajak terkait (Christian Natalis, 2021).

Pada kasus di instansi pemerintah, seperti kasus korupsi dana eks Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Kecamatan Kedungbanteng, Banyumas. Camat Kedungbanteng itu divonis penjara 4 tahun sedangkan dua terdakwa lainnya komisaris utama PT LKM dan Direktur PT LKM masing-masing divonis penjara lima tahun. Kepala Kejari Purwokerto mengatakan bahwa total kerugian 14 miliar yang berasal dari dana eks PNPM Mandiri Perdesaan. Tahun 2015 dana eks PNPM sebesar 5,9 miliar digunakan untuk modal dan investasi PT LKM KDM hingga tahun 2022 dana digunakan untuk jasa keuangan simpan pinjam dan berkembang menjadi 14 miliar. Padahal seharusnya dana tersebut tidak diperbolehkan untuk digunakan sebagai modal usaha sebuah perusahaan berbentuk Perseroan Terbatas atau PT. Atas tindakannya itu, keduanya dijerat dengan Pasal 2 ayat (1) Jo. pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dengan ancaman maksimal 20 tahun penjara, dan minimal satu tahun penjara.

Kedua kasus yang sudah dijelaskan di atas menjadi gambaran tentang bagaimana kurangnya moral idealism dan nilai etika perusahaan yang dapat mempengaruhi terbentuknya penilaian etis yang buruk. Praktik bisnis yang tidak etis dari kedua perusahaan ini memiliki efek merugikan yang tersebar luas terhadap banyak pihak. Dalam konteks ini peran penting dari pengakuan etis menjadi lebih jelas, karena kesadaran dan pengakuan atas isu-isu etika yang dapat membantu mencegah terjadinya keputusan yang tidak etis dan mendorong pelaksanaan tindakan yang lebih bertanggung jawab dalam dunia bisnis.

Konsep ini diperkuat oleh adanya ayat dalam Al-Qur'an yang terdapat dalam Surat Al-Shad ayat 24 :

وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ
مَّا هُمْ

Artinya:

“...Dan sesungguhnya kebanyakan orang-orang yang berkongsi (bersyarikat) itu, sebagian mereka berbuat zalim (curang) kepada sebagian yang lain. Kecuali orang-orang yang beriman dan beramal shaleh, tetapi mereka yang demikian jumlahnya sangat sedikit”

Ayat diatas menerangkan bahwa ketika individu melakukan kerjasama terkait perdagangan yang dilakukannya hendaknya saling membantu dan tidak berkhianat satu sama lain antar mitra kerjanya. Pentingnya kejujuran dan keadilan dalam kerjasama menjadi esensial untuk mencegah risiko bencana dan tindakan curang dalam menjalankan usaha bersama. Oleh karena itu,

mempertahankan etika bisnis dalam setiap kerjasama sangat ditekankan dan perlu dipahami dengan baik oleh setiap mitra bisnis.

Idealism adalah tindakan sikap seseorang untuk menghindari melakukan pelanggaran terhadap nilai-nilai yang dapat berpotensi menyebabkan kerugian bagi orang lain (Ariyanti and Widanaputra, 2018). Seseorang yang memiliki sifat idealis umumnya akan menghindari terlibat dalam kegiatan yang dapat menyakiti atau merugikan individu lain di sekitarnya. Individu yang bersikap idealis akan mengambil tindakan tegas terhadap peristiwa yang melibatkan penipuan atau merugikan orang lain. Penting bagi individu tersebut untuk memastikan bahwa aspirasinya tidak merugikan individu-individu di sekitarnya. Orang yang bersifat idealis akan menyadari bahwa kegiatan yang memberikan manfaat atau merugikan akan berdampak pada konsekuensi, dan mereka cenderung beroperasi sesuai dengan aturan dan prinsip-prinsip moral. Adnan et al (2019) semakin tinggi tingkat idealisme seseorang, semakin meningkat pula sikap etisnya dalam menjalankan tanggung jawab sebagai seorang profesional akuntansi. Ini mengindikasikan bahwa seseorang yang memiliki tingkat idealisme yang tinggi dalam memegang prinsip-prinsip etika cenderung selalu berperilaku secara etis. Berdasarkan penelitian Oboh (2019) telah mengeksplorasi bahwa *idealism* berpengaruh terhadap *ethical judgment*. Penelitian ini juga berfokus pada faktor-faktor pribadi dan intensitas moral. Faktor pribadi meliputi karakteristik individu seperti nilai-nilai, norma-norma, dan sikap terhadap etika. Sementara

itu, intensitas moral mengacu pada tingkat kepentingan moral suatu situasi masalah yang dihadapi.

Corporate ethical value memiliki peran penting dalam mempengaruhi pandangan etis individu. Nilai-nilai etika yang diterapkan oleh organisasi memberikan dasar dan panduan bagi pegawai pemerintahan untuk membuat keputusan yang etis. Dalam menjalankan aktivitas bisnis, perusahaan harus memperhatikan etika, baik di internal maupun eksternal. Etika bisnis menjadi acuan dan standar bagi karyawan, termasuk manajemen, dalam menjalankan tugas sehari-hari. Etika bisnis mencakup bagaimana perusahaan berperilaku secara etis dan mencari keseimbangan antara kepentingan perusahaan. Manfaat dari menerapkan nilai etika perusahaan adalah meningkatkan kredibilitas perusahaan karena etika menjadi bagian dari budaya korporasi. Nilai etika memiliki peran penting dalam mengurangi ketidakjelasan dalam pengambilan keputusan, menjelaskan tanggung jawab sosial perusahaan dalam dunia bisnis, dan memberikan kerangka bagi perusahaan untuk mengatur dirinya sendiri. Selain itu, nilai etika juga meningkatkan daya saing perusahaan, kepercayaan investor, dan citra positif perusahaan (Hotimah, 2020). Menurut penelitian Andrews et al (2011) menunjukkan bahwa nilai etika dan intensitas moral merupakan faktor penting dalam membangun dan mempertahankan tenaga kerja yang beretika dan berkomitmen. Pada studi ini juga ditemukan hubungan antara nilai-nilai etika perusahaan dan kesesuaian individu organisasi, dan menemukan bahwa intensitas moral yang memperkuat hubungan antara

kesesuaian dan kepuasan individu organisasi serta kesesuaian dan komitmen individu organisasi.

Concentration of effect menentukan sejauh mana suatu keputusan atau tindakan yang dapat memberikan dampak khusus pada pihak-pihak terkait. Konsentrasi efek ini mengacu seberapa besar dan intens dampak etis dari suatu keputusan pada kelompok atau entitas tertentu. Dalam menghadapi situasi etis, pemahaman terhadap sejauh mana dampak etis terkonsentrasi dapat membantu memastikan bahwa pertimbangan moral melibatkan keadilan distributif dan pertimbangan pada kelompok yang mungkin terpengaruh. Dengan memperhatikan konsentrasi efek penilaian etis dapat lebih teliti dalam mengidentifikasi dan memahami dinamika etis yang mungkin muncul dalam suatu konteks.

Penilaian etis adalah tindakan yang dilakukan oleh pegawai terhadap organisasi atau sesama pegawai dalam menjalankan perilaku yang dianggap etis. Indikator yang digunakan untuk mengukur penilaian etis mencakup penilaian terhadap keadilan, penilaian kebenaran dari sudut pandang moral, penilaian sesuai nilai keluarga, penilaian sesuai tradisi dan budaya, serta menghindari melanggar janji dan kesepakatan tertulis. Konsistensi dalam penilaian masalah etis juga menjadi bagian penting dalam proses tersebut (Herlina and Sudaryati, 2020).

Dalam menghadapi situasi etika, seorang profesional akuntansi akan melakukan keputusan berdasarkan pertimbangan etis. Saat membuat keputusan

etis, individu akan mempertimbangkan beberapa alternatif yang ada. Proses ini melibatkan pemilihan alternatif dan evaluasi konsekuensi masa depan, yang dikenal sebagai penilaian etis atau *ethical judgement*, dan merupakan bagian krusial dalam mengambil tindakan atau keputusan yang bersifat etis. Penting untuk diingat bahwa jika proses pemilihan alternatif atau penilaian etis tidak didasarkan pada pengetahuan, pemahaman, dan penerapan etika yang memadai, maka hasil keputusan dapat mengarah pada tindakan yang tidak etis.

Menurut Suryadi Winata (2014) *Ethical recognition* atau sering dikenal sebagai pengakuan etis mengacu pada pengakuan individu bahwa potensi keputusan atau tindakan mereka dapat mempengaruhi kepentingan, kesejahteraan atau harapan diri mereka sendiri atau orang lain dengan cara yang mungkin bertentangan dengan satu atau lebih prinsip etika. Ini adalah tahap yang penting dalam pengambilan keputusan etis, karena menjadi titik awal dari proses pengambilan keputusan yang etis.

Teori moral kognitif adalah suatu pendekatan dalam psikologi moral yang meneliti perkembangan pemahaman moral dan proses kognitif yang mendasarinya. Salah satu teori moral kognitif yang terkenal adalah teori perkembangan moral oleh Lawrence Kohlberg. Kohlberg mengusulkan enam tahap perkembangan moral. Tingkat prakonvensional, konvensional, dan pascakonvensional. Dimana masing-masing tingkatan memiliki dua tahap yang mencerminkan tingkat kompleksitas pemahaman moral individu.

Penelitian-penelitian sebelumnya memiliki batasan masing-masing dan memerlukan inovasi dengan pengujian variabel baru. Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian yang telah dilakukan oleh (Mohd Ghazali, 2021) dan (Obloh, 2019) dengan memasukkan aspek personal (*moral idealism*), aspek organisasi (*corporate ethical value*), aspek moral intensity (*concentration of effect*) terhadap *ethical judgement* melalui *ethical recognition* sebagai variabel mediasi pada pegawai instansi pemerintahan. Oleh karena itu, peneliti memutuskan untuk melakukan penelitian baru yang berjudul "Pengaruh *Moral Idealism, Corporate Ethical Value, Concentration of Effect* terhadap *Ethical Judgement* dengan Variabel Mediasi *Ethical Recognition* (Studi Empiris Pada Pegawai di Instansi Pemerintahan Kabupaten Banyumas)." Penelitian ini memiliki inovasi dengan menambahkan variabel *ethical recognition* sebagai variabel mediasi. Karena *ethical recognition* ini mempunyai peran penting dalam menghubungkan pemahaman etika pada proses pengambilan keputusan etis. Dalam konteks ini, *ethical recognition* berfungsi sebagai perantara antara pemahaman nilai-nilai etis dan penerapan prinsip-prinsip tersebut.

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi pengaruh *moral idealism, corporate ethical value, dan concentration of effect* terhadap *ethical judgement* dengan variabel mediasi *ethical recognition*. Penelitian ini akan dilaksanakan di instansi pemerintahan Kabupaten Banyumas sebagai contoh studi empiris. Instansi pemerintahan memiliki peran krusial dalam menyediakan pelayanan publik dan mengambil keputusan yang adil. Oleh karena itu, memahami faktor-

faktor yang mempengaruhi penilaian etis di kalangan pegawai pemerintahan sangat penting. Dalam konteks ini, *moral idealism* dianggap sebagai faktor signifikan yang mendorong individu untuk mengutamakan keputusan yang didasarkan pada nilai-nilai moral yang tinggi, seperti integritas, kejujuran, dan keadilan.

B. RUMUSAN MASALAH

1. Apakah *moral idealism* berpengaruh positif terhadap *ethical judgement*?
2. Apakah *corporate ethical value* berpengaruh positif terhadap *ethical judgement*?
3. Apakah *concentration of effect* berpengaruh positif terhadap *ethical judgement*?
4. Apakah *moral idealism* berpengaruh positif terhadap *ethical recognition*?
5. Apakah *corporate ethical value* berpengaruh positif terhadap *ethical recognition*?
6. Apakah *concentration of effect* berpengaruh positif terhadap *ethical recognition*?
7. Apakah *ethical recognition* berpengaruh positif ke *ethical judgement*?
8. Apakah *moral idealism* berpengaruh positif terhadap *ethical judgement* melalui *ethical recognition* sebagai variabel mediasi?
9. Apakah *corporate ethical value* berpengaruh positif terhadap *ethical judgement* melalui *ethical recognition* sebagai variabel mediasi?

10. Apakah *concentration of effect* berpengaruh positif terhadap *ethical judgement* melalui *ethical recognition* sebagai variabel mediasi?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan hasil rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menguji dan memperoleh bukti secara empiris pengaruh *moral idealism* terhadap *ethical judgement*.
2. Untuk menguji dan memperoleh bukti secara empiris pengaruh *corporate ethical value* terhadap *ethical judgement*.
3. Untuk menguji dan memperoleh bukti secara empiris pengaruh *concentration of effect* terhadap *ethical judgement*.
4. Untuk menguji dan memperoleh bukti secara empiris pengaruh *moral idealism* terhadap *ethical recognition*.
5. Untuk menguji dan memperoleh bukti secara empiris pengaruh *corporate ethical value* terhadap *ethical recognition*.
6. Untuk menguji dan memperoleh bukti secara empiris pengaruh *concentration of effect* terhadap *ethical recognition*.
7. Untuk menguji dan memperoleh bukti secara empiris pengaruh *ethical recognition* terhadap *ethical judgment*.
8. Untuk menguji dan memperoleh bukti secara empiris pengaruh *moral idealism* terhadap *ethical judgement* jika dimediasi oleh *ethical recognition*.

9. Untuk menguji dan memperoleh bukti secara empiris pengaruh *corporate ethical value* terhadap *ethical judgement* jika dimediasi oleh *ethical recognition*.
10. Untuk menguji dan memperoleh bukti secara empiris pengaruh *concentration of effect* terhadap *ethical judgement* jika dimediasi oleh *ethical recognition*.

D. Manfaat Penelitian

Penyusunan penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya dan dapat memberikan gagasan baru kepada peneliti selanjutnya dalam mengembangkan serta memperluas dengan topik yang serupa. Selain itu, diharapkan penelitian ini memberikan tambahan pengetahuan tentang teori-teori yang ada sehingga memperkuat penelitian-penelitian sejenis dan dapat dijadikan sebagai referensi.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sarana bagi peneliti lain untuk memperluas pemahaman mereka tentang *ethical judgement* sehingga dapat membantu dalam penelitian selanjutnya.

b. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat membantu pemerintah dalam pemahaman mengenai faktor-faktor yang dapat mempengaruhi *ethical judgment* dan dapat memperkuat agar tidak terjadi pelanggaran etika dalam lingkungan organisasi.

c. Bagi Pembaca

Bagi pembaca, diharapkan pembaca mengetahui apa saja yang dapat mempengaruhi *ethical judgment* dan diharapkan juga dapat membantu penelitian selanjutnya.